



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

## Gaji Kades Nunggu, Bakal Dibayar di APBDP

**BINTUHAN** - Pembayaran gaji para Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Kaur sejak bulan April sampai dengan bulan Agustus menunggak.

Hal ini lantaran anggaran di kas daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur yang kosong.

Oleh karena itu, dalam rapat Paripurna DPRD pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) beberapa waktu yang lalu Bupati Kaur H. Lismidianto SH, MH, meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelesaikan pembayaran gaji Kades di APBD Perubahan (P) mendatang.

"Di APBDP saya telah perintahkan tim untuk menyelesaikan semua pembayaran gaji Kades, sebelum pergantian tahun jangan sampai belum ada gaji yang belum dibayarkan," Kata Bupati.

Selain itu, Bupati juga meminta kepada seluruh jajaran pejabat di ruang lingkup Pemkab Kaur supaya benar-benar bisa memanfaatkan anggaran APBDP nanti sesuai dengan peruntukan yang telah di susun dalam draft.

Kegiatan yang masih terhambat juga diminta agar segera diselesaikan, sehingga di akhir tahun nanti semua anggaran dapat terserap dan Kaur tidak mengalami defisit seperti sebelumnya. "Semua OPD harus bergerak cepat, agar APBDP nanti dapat terserap sesuai dengan peruntukan," sampai Bupati.

Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur Leo Tarnando S.H., mengatakan, untuk pembayaran gaji para Kades Pemkab Kaur harus mengeluarkan dana yang cukup besar per triwulannya sebanyak Rp14,5 miliar.

Saat ini pembayaran gaji para Kades baru selesai di triwulan I, bulan Januari, Februari, Maret.

Sementara untuk triwulan II sekarang sedang dalam tahapan pengajuan. Dari 192 desa baru sebanyak 62 desa yang mengajukan ke BPKAD.

"Untuk pembayaran gaji Kades sekarang sudah mulai proses, sedang dalam tahap pengajuan," kata Leo. Leo mengaku, untuk pembayaran gaji para Kades memang terkadang prosesnya cukup terlambat sebab terkendala di anggaran Kas Daerah (Kasda) yang sering kosong.

Sementara untuk pembayaran gaji para Kades itu sendiri sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memang sangat terbatas. "Memang terkadang sering terlambat, tapi di penghujung tahun semuanya di targetkan selesai," ungkap Leo.

Terpisah Kepala Desa Wayhawang Kecamatan Maje Ahmad Marzuki, M.Pd mengaku, untuk pencairan gaji mereka harus menunggu lebih dari 3 bulan tak sesuai dengan regulasi yang ditentukan.

Meskipun keterbatasan anggaran melalui peraturan yang baru ini diharapkan terkait dengan gaji agar bisa menjadi perhatian lebih oleh Pemkab Kaur.

"Dengan peraturan baru, pembayaran gaji diharapkan agar lebih tepat waktu. Jangan terlalu sering tidak sesuai regulasi," sampainya. (cil)